



<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i1.23131>

WABAH PENYAKIT TERNAK DI BEKASI MASA HINDIA BELANDA (1880-1908)

Muhammad Mulky Al Haremein^{1,2*}

¹ Prodi S1 Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

² Program Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email Koresponden: muhammadmulkyalharemein@gmail.com^{1*}

Article history: Submitted: 2026-01-17 | Accepted: 2026-03-01 | Published 2026-04-01

Abstrak

Wabah penyakit ternak merupakan persoalan serius yang memengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat agraris di Jawa pada masa kolonial, termasuk di Bekasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis wabah penyakit ternak pada periode 1880–1908, pola penyebarannya, serta respons pemerintah kolonial Hindia Belanda. Metode yang digunakan adalah metode sejarah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dengan memanfaatkan sumber utama berupa surat kabar kolonial sezaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bekasi rentan terhadap berbagai wabah seperti rinderpest, antraks, penyakit mulut dan kuku, “ngorok”, dan Septichaemia Epizootica. Kerentanan ini dipengaruhi oleh mobilitas ternak, struktur agraris, dan ketergantungan pada tenaga hewan. Kebijakan kolonial berupa karantina, pembatasan wilayah, dan pemusnahan ternak menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan akibat lemahnya mekanisme kompensasi. Wabah penyakit ternak tidak hanya menjadi masalah kesehatan hewan, tetapi juga mencerminkan relasi kekuasaan kolonial dan kerentanan struktural masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Wabah Penyakit Ternak, Bekasi, Hindia Belanda, Kebijakan Kolonial.

Abstract

Livestock disease outbreaks constituted a serious problem affecting the economic and social life of agrarian communities in colonial Java, including Bekasi. This study aims to analyze the types of livestock diseases during the period 1880–1908, their patterns of spread, and the responses of the Dutch East Indies colonial government. The research employs the historical method, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, using primary sources from contemporary colonial newspapers. The findings indicate that Bekasi was highly vulnerable to diseases such as rinderpest, anthrax, foot-and-mouth disease, “ngorok,” and Septichaemia Epizootica. This vulnerability was shaped by livestock mobility, agrarian structures, and dependence on animal labor. Colonial policies—such as quarantine, territorial restrictions, and livestock culling—had significant socio-economic impacts due to weak compensation mechanisms. Thus, livestock disease outbreaks were not merely animal health issues but also reflected colonial power relations and the structural vulnerability of rural communities.

Keywords: Livestock Disease Outbreaks, Bekasi, Dutch East Indies, Colonial Policy.

PENDAHULUAN

Wabah penyakit ternak merupakan persoalan krusial dalam sejarah masyarakat agraris di Jawa, khususnya di

Bekasi pada masa kolonial. Penyakit menular seperti veepest (runderpest), antraks, dan penyakit mulut dan kuku tidak hanya mengancam kesehatan hewan, tetapi juga memengaruhi sistem

pertanian, ekonomi pedesaan, serta relasi antara negara kolonial dan masyarakat lokal. Dalam konteks Hindia Belanda, sapi dan kerbau memiliki peran vital sebagai tenaga kerja pertanian, sarana transportasi, dan penopang ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, wabah penyakit ternak kerap berujung pada krisis sosial-ekonomi yang meluas, terutama di wilayah agraris seperti Bekasi.

Kajian Van Roosbroeck (2016) tentang wabah veepest di Austrian Netherlands (1769–1785) menunjukkan bahwa penyakit ternak telah menjadi persoalan serius sejak abad ke-18 dan mendorong lahirnya kebijakan kesehatan hewan oleh negara. Pemerintah menerapkan pemusnahan ternak secara preventif yang disertai kompensasi sebagai upaya menekan penyebaran penyakit. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kondisi lokal. Di wilayah pedalaman, kebijakan ini relatif berhasil, sementara di daerah pesisir dengan peternakan komersial dan mobilitas tinggi, angka kematian ternak justru tetap tinggi. Perbedaan ini memperlihatkan keterbatasan kebijakan kesehatan hewan yang diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan faktor ekologis dan sosial-ekonomi setempat.

Adapun kajian mengenai sejarah wabah penyakit ternak pada masa kolonial di Indonesia dapat ditemukan dalam tulisan *Leed en Lief uit Bantam*. Tulisan (Van Sandick, 1893) menunjukkan bahwa wabah ternak pada akhir abad ke-19 ditangani pemerintah kolonial melalui kebijakan karantina, pemusnahan ternak, dan pengaturan lalu lintas hewan. Namun, kebijakan tersebut kerap memicu ketegangan sosial karena ternak merupakan aset ekonomi utama masyarakat agraris. Dalam praktiknya,

kebijakan kesehatan hewan mencerminkan relasi kekuasaan kolonial yang menempatkan kepentingan administratif dan ekonomi negara kolonial di atas keberlangsungan hidup masyarakat lokal, sehingga menciptakan kerentanan struktural bagi petani dan peternak pribumi.

Kemudian terdapat kajian juga tentang wabah penyakit ternak disalah satu publikasi (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018) dalam bukunya yang berjudul “Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (PHM), Seri Penyakit Anthrax”. Publikasi ini mencatat bahwa laporan mengenai penyakit ternak yang menyerupai antraks telah muncul sejak akhir abad ke-19, antara lain dalam *Javasche Courant* tahun 1884 terkait kasus penyakit pada kerbau di Teluk Betung, Lampung, yang kemudian diperkuat oleh *Koloniaal Verslag* tahun 1885. Pada 1886, wabah antraks dilaporkan meluas ke berbagai wilayah di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan kawasan timur Indonesia. Sejumlah laporan juga mengaitkan penyebaran antraks dengan impor ternak pada pertengahan abad ke-19, termasuk sapi perah dari Eropa dan sapi Ongole dari Asia Selatan.

Kajian mengenai wabah penyakit ternak juga muncul pada periode pascakolonial, sebagaimana ditunjukkan oleh Triyanto Ramadhan & Santi Muji Utami (2025) dalam studi tentang penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah bekas Karesidenan Semarang pada 1981–1986. Studi tersebut memperlihatkan bahwa lemahnya sistem biosekuriti serta mobilitas ternak, termasuk ternak impor, berperan penting dalam penyebaran wabah. Meskipun pemerintah

pascakolonial menerapkan berbagai kebijakan pengendalian, kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan wabah ternak tetap sangat bergantung pada kapasitas negara dan struktur tata kelola yang tersedia.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai sejarah wabah penyakit ternak di Indonesia masih dominan menempatkan wabah dalam kerangka medis veteriner, kebijakan kesehatan hewan, atau dampak ekonomi dalam skala makro, baik pada masa kolonial maupun pascakolonial. Sementara itu, kajian yang membaca wabah penyakit ternak sebagai fenomena historis yang berkelindan dengan dinamika sosial-ekonomi lokal, relasi kekuasaan kolonial, serta pengalaman masyarakat pedesaan masih relatif terbatas. Dalam konteks wilayah Bekasi pada masa Hindia Belanda, penelitian mengenai wabah penyakit ternak juga belum banyak dilakukan secara mendalam dengan memanfaatkan arsip kolonial, khususnya surat kabar sezaman dan laporan administratif pemerintah kolonial.

Oleh karena itu, kebaruan artikel ini tidak semata terletak pada pilihan wilayah kajian, melainkan pada perspektif analitis yang digunakan. Dengan menjadikan Bekasi pada periode 1880–1908 sebagai studi kasus, artikel ini memaknai wabah penyakit ternak sebagai arena relasi kekuasaan kolonial, di mana kebijakan pengendalian seperti karantina, pembatasan lalu lintas ternak, dan pemusnahan hewan tidak hanya bertujuan menjaga kesehatan hewan, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap pembentukan kerentanan struktural petani. Melalui pendekatan sejarah sosial-ekonomi, penelitian ini

menunjukkan bahwa politik kesehatan hewan kolonial turut berkontribusi pada krisis agraria lokal dan memperdalam ketimpangan hubungan antara negara kolonial dan masyarakat pedesaan.

Secara konseptual, artikel ini berpijak pada pendekatan sejarah sosial dan analisis relasi kekuasaan kolonial dengan menekankan konsep kerentanan struktural. Kebijakan pengendalian wabah dipahami sebagai praktik pemerintahan kolonial dalam mengatur populasi dan sumber daya agraris yang kerap mengabaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal (Laura Stoler, 2010). Dalam kerangka ini, petani berada dalam posisi rentan yang dibentuk oleh ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi pada ternak, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan kompensasi (Farmer, 2004).

Penelitian ini bertujuan mengkaji sejarah wabah penyakit ternak di wilayah Bekasi pada masa Hindia Belanda serta dampaknya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat agraris. Artikel ini menganalisis jenis penyakit ternak yang mewabah, pola penyebarannya, serta respons pemerintah kolonial dalam upaya pengendalian wabah. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan pengendalian penyakit ternak menjadi arena interaksi antara negara kolonial dan masyarakat lokal, sekaligus merefleksikan relasi kekuasaan yang membentuk kerentanan struktural petani. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan historiografi wabah penyakit ternak di Indonesia dan kajian sejarah sosial-ekonomi pedesaan Jawa pada masa kolonial.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif memiliki ciri yang berbeda dari penelitian lainnya, terutama dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Jika penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran dan angka, penelitian kualitatif lebih fokus pada pemahaman makna dan proses (Sutendy, 2015, p. 222).

Penelitian sejarah sering merujuk pada penelitian kualitatif dijelaskan secara deskriptif. Maka dari itu, penelitiannya harus dilakukan adalah melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Madjid & Wahyudi, 2014). Pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber-sumber primer berupa surat kabar kolonial sezaman yang memuat laporan administrasi Hindia Belanda sekaligus memberikan informasi tentang wabah penyakit ternak di Bekasi. Sumber-sumber primer tersebut diperoleh dalam situs web Delpher.nl (2013). Tahap kritik sumber dilakukan untuk menilai keaslian, kredibilitas dan konteks informasi yang terdapat dalam sumber. Tahapan ini penting untuk memastikan relevansi informasi mengenai wabah penyakit ternak di Bekasi pada masa Hindia Belanda. Beranjak ke tahap interpretasi, peneliti memerlukan analisis data secara tematik untuk memahami pola penyebaran wabah penyakit ternak, respons pemerintah kolonial, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal. Terakhir adalah tahapan historiografi yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menyusun hasil analisis secara kronologis guna menyusun peristiwa wabah penyakit ternak dalam konteks sosial-ekonomi lokal Bekasi pada masa Hindia Belanda.

Demikian penjelasan mekanisme metode sejarah yang penulis kemas secara komprehensif. Keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh kemampuan memilih serta menggunakan metode (Wijayanti & Kartika, 2014, p. 3). Sebagai sumber kolonial, surat kabar merepresentasikan perspektif negara, sehingga suara petani hanya dapat dibaca secara tidak langsung dalam laporan kolonial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konteks Umum Wabah Penyakit Ternak di Jawa pada Akhir Abad ke-19

Penyebaran rinderpest pada pertengahan 1880 di Jawa bagian barat memperlihatkan bahwa epidemi ternak tidak berkembang secara acak, melainkan mengikuti pola mobilitas dan struktur ekonomi agraris kolonial. Laporan 16–21 Juni 1880 menunjukkan ketidakteraturan spasial di Karesidenan Batavia: sebagian distrik relatif terbebas, sementara Buitenzorg mengalami kasus baru di kampung-kampung yang sebelumnya aman. Pola ini menegaskan bahwa jaringan pergerakan ternak antarkampung menjadi medium utama transmisi penyakit.

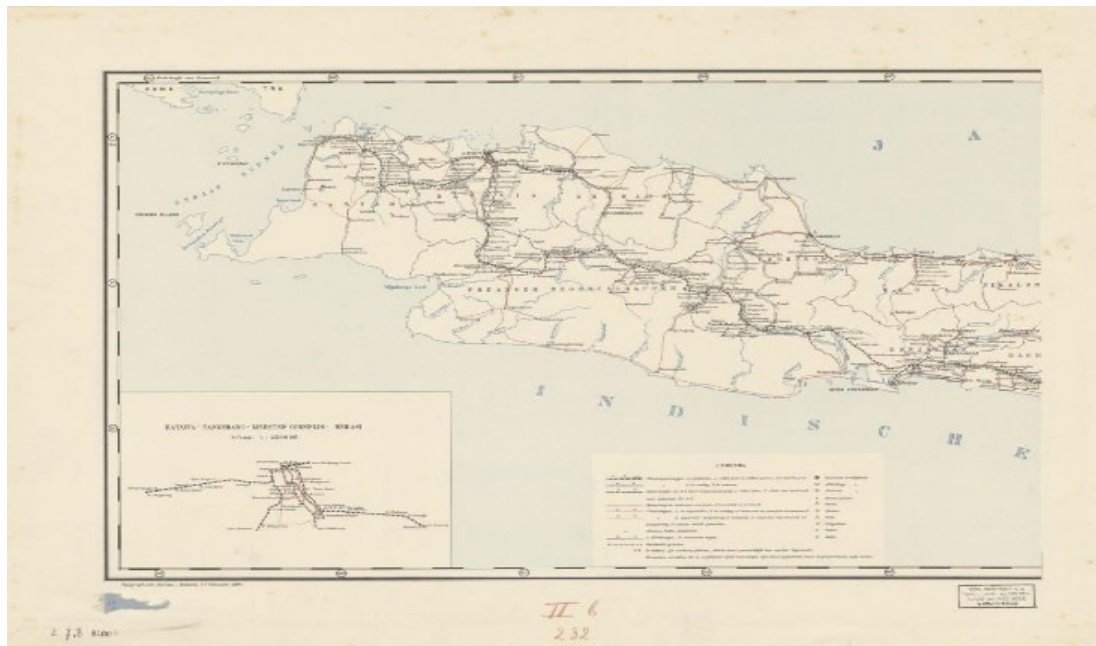
Respons kolonial berupa pemusnahan ternak terinfeksi menunjukkan bahwa pengendalian wabah dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas produksi, bukan perlindungan ekonomi petani. Puluhan kerbau dimusnahkan dalam periode tersebut, sebuah tindakan yang secara administratif rasional, namun secara sosial memperdalam kerentanan petani yang menggantungkan modal produksi pada ternak. Di sini, wabah berfungsi sebagai titik masuk intervensi negara terhadap

ekonomi agraris lokal. Penyebaran kasus hingga Desa Pantjoer di Karesidenan Bantam menegaskan bahwa epidemi bergerak melintasi batas administratif (Landbouw-courant, 1880).

Fakta ini mengungkap keterbatasan kapasitas kontrol kolonial sekaligus memperlihatkan paradoks, infrastruktur agraris dan mobilitas yang menopang ekonomi kolonial justru menjadi jalur penyebaran penyakit. Dengan demikian, wabah rinderpest 1880 tidak hanya merupakan krisis biologis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur

kolonial menciptakan sekaligus mengelola risiko dalam ruang agraris.

Penyebaran rinderpest pada pertengahan 1880 di Jawa bagian barat memperlihatkan bahwa epidemi ternak bergerak melampaui batas administratif residensi. Kasus di Desa Pantjoer, Afdeling Lebak, Karesidenan Bantam, menunjukkan bahwa wabah tidak dapat dikendalikan hanya melalui pengawasan lokal di Batavia. Mobilitas ternak dan keterhubungan agraris antarwilayah menjadikan batas administratif kolonial kurang efektif sebagai sekat epidemiologis.



Bagan 1. Peta Infrastruktur Jawa (1900) yang menunjukkan jaringan transportasi sebagai jalur transmisi wabah penyakit ternak lintas wilayah. (Sumber: (Topographisch Bureau, 1900), Digital Collections, Leiden University).

Sebagai respons terhadap dinamika wabah, pemerintah kolonial kembali mengandalkan pemusnahan ternak sebagai instrumen utama pengendalian. Dalam kurun waktu 18–21 Juni 1880, tercatat sebanyak 19 ekor kerbau sakit dan 19 ekor kerbau yang diduga terjangkit dirusak di lima kampung Distrik Buitenzorg. Intensitas tindakan ini mencerminkan pendekatan kesehatan hewan kolonial yang menitikberatkan

pada eliminasi ternak sebagai strategi isolasi wabah, sekaligus menunjukkan besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung masyarakat lokal akibat kebijakan tersebut (Java-Bode: Nieuws, 1880).

Laporan mengenai penghentian cordon sanitaire di beberapa distrik seperti Jasinga dan Leuwiliang memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian bersifat fluktuatif dan

sangat bergantung pada kalkulasi administratif negara. Wabah diperlakukan bukan semata sebagai krisis kesehatan hewan, tetapi sebagai isu yang menyentuh stabilitas ekonomi dan tata kelola wilayah. Dengan demikian, kebijakan kesehatan hewan menjadi bagian dari mekanisme pengaturan ruang agraris dan mobilitas ternak.

Meski demikian, situasi wabah di Distrik Buitenzorg tetap bersifat fluktuatif. Beberapa wilayah seperti Tjiseroea, Kampong Baroe, dan Tjikoppo dilaporkan bebas penyakit, sementara di tanah Dramaga wabah masih muncul secara sporadis dengan dua kampung tercatat terinfeksi. Dalam konteks ini, enam ekor kerbau sakit kembali dirusak, menunjukkan bahwa pengendalian wabah di kawasan agraris sekitar Batavia belum sepenuhnya stabil.

Kemunculan kembali wabah di Tjidjeroek dan Pondok Gede setelah periode 13–18 Juni 1880 menunjukkan bahwa kebijakan karantina dan pemusnahan ternak belum mampu menciptakan stabilitas epidemiologis di Distrik Buitenzorg. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pengendalian wabah tidak hanya ditentukan oleh tindakan administratif, tetapi juga oleh faktor struktural seperti kepadatan aktivitas agraris, mobilitas ternak, serta kedekatan wilayah tersebut dengan pusat distribusi Batavia. Dalam konteks ini, Buitenzorg menjadi ruang yang rentan karena posisinya dalam jaringan ekonomi kolonial justru memperbesar risiko penularan.

Kemunculan kembali wabah di Tjidjeroek dan Pondok Gede setelah periode 13–18 Juni 1880 menunjukkan bahwa kebijakan karantina dan pemusnahan ternak belum mampu menciptakan stabilitas epidemiologis di

Distrik Buitenzorg. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa pengendalian wabah tidak hanya ditentukan oleh tindakan administratif, tetapi juga oleh faktor struktural seperti kepadatan aktivitas agraris, mobilitas ternak, serta kedekatan wilayah tersebut dengan pusat distribusi Batavia. Dalam konteks ini, Buitenzorg menjadi ruang yang rentan karena posisinya dalam jaringan ekonomi kolonial justru memperbesar risiko penularan.

Variasi tingkat keparahan di sejumlah distrik Priangan dari wilayah yang tidak mencatat kasus baru hingga daerah dengan kematian ternak tinggi menegaskan bahwa pengendalian wabah tidak berlangsung seragam. Keberhasilan atau kegagalan sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, struktur ekonomi setempat, dan intensitas intervensi administratif. Dengan demikian, dinamika di Priangan memperlihatkan bahwa wabah bukan sekadar persoalan kesehatan hewan, melainkan peristiwa yang menguji kapasitas kontrol kolonial atas ruang agraris yang kompleks dan beragam.

Memasuki pertengahan Juli 1880, sejumlah wilayah seperti Banyumas dan Tangerang dilaporkan tidak lagi mencatat kasus baru rinderpest atau menunjukkan tren penurunan signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa dinamika wabah tidak berlangsung seragam antarresidensi. Perbedaan tingkat keparahan tersebut sangat dipengaruhi oleh konfigurasi loka termasuk mobilitas ternak, kepadatan aktivitas agraris, serta intensitas pengawasan administratif kolonial. Dengan kata lain, kerentanan terhadap wabah berkorelasi erat dengan posisi wilayah dalam jaringan ekonomi kolonial. (Bataviaasch Handelsblad, 1880).

Namun, stabilitas tersebut tidak sepenuhnya tercermin di seluruh kawasan sekitar Batavia. Di Afdeling Meester Cornelis, misalnya, dalam periode 4–10 Juli 1880 tercatat pemusnahan ratusan kerbau sebagai bagian dari kebijakan pengendalian. Meskipun distribusi kasus tidak merata dan sebagian kampung telah terbebas, angka eliminasi yang tinggi menunjukkan bahwa strategi kolonial tetap bertumpu pada tindakan represif terhadap ternak sebagai instrumen utama kontrol epidemiologis.

Pola ini memperlihatkan paradoks pengelolaan wabah kolonial. Di satu sisi, statistik penurunan kasus digunakan untuk menunjukkan keberhasilan administratif. Di sisi lain, kebijakan pemusnahan dalam skala besar memperlihatkan bagaimana negara kolonial menegaskan otoritasnya atas modal produksi masyarakat agraris. Fluktuasi antarwilayah dari Banyumas yang pulih hingga Meester Cornelis dengan angka eliminasi tinggi menunjukkan bahwa wabah rinderpest 1880 bukan sekadar krisis biologis, melainkan momen ketika relasi kuasa kolonial terhadap ekonomi pedesaan bekerja secara langsung melalui regulasi mobilitas dan kontrol atas ternak.

Letak Afdeling Meester Cornelis di antara pusat administrasi Batavia dan kawasan agraris di sekitarnya menjadikannya zona transisi dalam dinamika wabah rinderpest 1880. Posisi geografis ini memperlihatkan bahwa wilayah penyangga administratif tidak sepenuhnya mampu menahan pergerakan penyakit menuju daerah agraris dengan mobilitas ternak yang lebih intensif. Dengan demikian, kerentanan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan karantina, tetapi juga oleh posisi suatu

wilayah dalam jaringan distribusi dan lalu lintas ternak kolonial.

Perkembangan di Afdeling Buitenzorg periode 7–12 Juli 1880 menunjukkan kecenderungan penurunan kasus di beberapa distrik, disertai terbebasnya sejumlah wilayah dari infeksi. Namun, kemunculan kembali kasus di lokasi lain serta tindakan pemusnahan ternak yang tetap dilakukan menegaskan bahwa stabilisasi wabah belum bersifat menyeluruh. Pengendalian yang tampak berhasil secara statistik masih menyisakan fluktuasi sporadis yang menunjukkan keterbatasan kapasitas administratif kolonial dalam mengelola dinamika epidemi yang kompleks.

Pola ini menegaskan bahwa meredanya wabah di sekitar Batavia bukan berarti hilangnya risiko, melainkan pergeseran spasial kerentanan. Selama mobilitas ternak dan integrasi ekonomi agraris tetap berlangsung, kemungkinan penularan ulang tetap terbuka. Dalam konteks tersebut, wabah rinderpest memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi kolonial sekaligus menciptakan kerentanan dan menuntut intervensi kontrol negara melalui regulasi mobilitas dan pemusnahan ternak.

Perkembangan wabah pada awal Juli 1880 di luar Jawa bagian barat menunjukkan bahwa dinamika penyakit ternak tidak hanya bersifat regional, tetapi lintas residensi. Di Palembang, sebagian wilayah seperti Rawas dan Sintangstreken dilaporkan telah pulih, sementara di Kepahiang dan beberapa onderafdeeling lain masih ditemukan kasus terbatas yang diidentifikasi sebagai rinderpest. Pola ini memperlihatkan bahwa proses pemulihan berlangsung tidak seragam dan sangat dipengaruhi

oleh kondisi lokal serta kapasitas pengawasan administratif kolonial.

Pada saat yang sama, laporan resmi juga mencatat kemunculan pes ternak di sejumlah wilayah lain serta kasus antraks di Kediri. Kehadiran lebih dari satu jenis penyakit ternak dalam periode yang relatif bersamaan menunjukkan bahwa

sistem peternakan kolonial berada dalam kondisi rentan secara struktural. Mobilitas ternak, keterhubungan antarwilayah, dan intensifikasi ekonomi agraris menciptakan ruang bagi penyebaran berbagai penyakit secara simultan (Bataviaasch Handelsblad, 1880).



Bagan 2. Peta Wilayah Residensi Batavia Akhir Abad ke-19. Peta ini memperlihatkan keterhubungan antara pusat kota Batavia dengan distrik-distrik di sebelah timur, khususnya Bekasi, yang menjadi zona krusial dalam pengawasan Kesehatan hewan ternak. (Sumber: (Topographisch Bureau, 1899), Digital Collections, Leiden University Libraries).

Pemberitaan pada akhir 1881 hingga awal 1882 menunjukkan bahwa dinamika wabah penyakit ternak belum sepenuhnya berakhir. Meskipun Kota Batavia dan wilayah sekitarnya sempat dinyatakan bebas dari wabah pada penghujung 1881, kemunculan kembali kasus pada awal Januari 1882 segera direspons dengan pemusnahan ternak dalam jumlah signifikan. Pola ini memperlihatkan bahwa status “bebas wabah” dalam laporan resmi bersifat sementara dan sangat bergantung pada pengawasan administratif yang ketat. Dalam waktu hampir bersamaan, kasus juga terdeteksi di distrik-distrik sekitar Batavia seperti Kebayoran, Meester-Cornelis, dan Buitenzorg, serta di

residensi lain seperti Karawang dan Cirebon. Kemunculan kasus secara serentak di berbagai wilayah Jawa bagian barat menunjukkan bahwa penyebaran penyakit ternak tetap bersifat regional dan terhubung, bukan terisolasi secara lokal. Fluktuasi antarwilayah menegaskan bahwa pengendalian kolonial belum mampu menciptakan stabilitas epidemiologis yang berkelanjutan (Het Vaderland, 1882).

Secara regional, pola penyebaran wabah penyakit ternak pada periode 1880–1882 memperlihatkan bahwa mobilitas ternak, keterhubungan antarresidensi, serta jalur transportasi kolonial menjadi faktor utama dalam perluasan penyakit. Integrasi ekonomi

agraris yang menghubungkan pusat administrasi Batavia dengan wilayah-wilayah produksi di sekitarnya justru menciptakan ruang epidemiologis yang saling terhubung dan rentan terhadap penularan ulang. Fluktuasi kasus di berbagai distrik menunjukkan bahwa pengendalian administratif tidak sepenuhnya mampu memutus rantai penyebaran yang bergerak mengikuti arus distribusi dan lalu lintas ternak.

Pola struktural tersebut kemudian tampak lebih tajam di wilayah Bekasi, yang sebagai daerah agraris penyangga Batavia menempati posisi strategis dalam jaringan produksi dan distribusi kolonial. Kerentanan yang sebelumnya terlihat pada tingkat regional memperoleh bentuk yang lebih konkret di tingkat lokal, menjadikan Bekasi sebagai ruang penting untuk memahami bagaimana wabah, mobilitas ekonomi, dan intervensi negara kolonial saling berhubungan satu sama lain.

Bekasi sebagai Episentrum Lokal Wabah Penyakit Ternak dan Pencegahannya (1880–1908)

Sebagaimana telah terlihat pada tingkat regional, penyebaran wabah penyakit ternak mengikuti jalur mobilitas dan keterhubungan ekonomi kolonial. Pola tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret di wilayah Bekasi, sebuah daerah agraris penyangga Batavia yang terintegrasi dalam jaringan distribusi regional. Di wilayah ini, wabah tidak menyebar secara merata, melainkan memperlihatkan konsentrasi spasial tertentu yang mencerminkan karakter lokal serta struktur mobilitas agraris yang berbeda dari wilayah lain di sekitar Batavia.

Konsentrasi kasus di wilayah Tambun menunjukkan bahwa

penyebaran pes ternak di Bekasi mengikuti pola spasial yang spesifik. Faktor-faktor seperti kepadatan aktivitas pertanian, intensitas mobilitas ternak, serta keterhubungan Tambun dengan jalur distribusi menuju Batavia dan daerah sekitarnya diduga memperbesar tingkat kerentanan dibandingkan wilayah barat Sungai Bekasi yang relatif lebih terkendali. Dengan demikian, wabah di Bekasi bukan sekadar perpanjangan dari dinamika regional, melainkan memperlihatkan karakter lokal yang dipengaruhi oleh konfigurasi ekonomi dan geografis setempat.

Laporan resmi yang kemudian dipublikasikan dalam pers Belanda menunjukkan bahwa selama periode 3–19 Juni 1880 di Distrik Bekasi dilakukan pemusnahan terhadap ratusan ekor kerbau, baik yang dinyatakan sakit maupun yang dicurigai terjangkit. Di Distrik Tjabang-Boengin, tindakan serupa juga dilakukan meskipun dalam jumlah lebih kecil. Skala eliminasi ini menandakan bahwa Bekasi termasuk wilayah dengan tingkat keparahan signifikan pada fase awal wabah, sekaligus menjadi sasaran intervensi administratif yang intensif (De Standaard, 1880; Java-Bode: Nieuws, 1880; Landbouw-courant, 1880).

Perbedaan tingkat dampak antarwilayah dalam satu distrik yang sama mendorong pemerintah kolonial untuk memperkeras kebijakan pemusnahan ternak sebagai instrumen utama pengendalian. Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa respons negara tidak hanya ditentukan oleh aspek medis, tetapi juga oleh kalkulasi administratif terhadap wilayah yang dianggap berisiko tinggi dalam jaringan produksi agraris. Dalam konteks ini, Tambun menjadi titik krusial yang menunjukkan bagaimana

konsentrasi wabah berkorelasi dengan posisi spasial dan peran ekonominya dalam sistem kolonial.

Distrik Bekasi tercatat sebagai salah satu wilayah yang masih mengalami persistensi wabah pes ternak dengan sebaran kasus di sejumlah tanah dan kampung. Penyakit dilaporkan muncul di 17 kampung dengan total lebih dari seratus ekor kerbau dimusnahkan, sebagian besar di antaranya dinyatakan benar-benar sakit. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengendalian telah diterapkan sebelumnya, wabah belum sepenuhnya teratasi dan masih bertahan dalam pola yang terfragmentasi di berbagai titik.

Jika dilihat secara spasial, tingkat keparahan antarwilayah dalam distrik yang sama memperlihatkan variasi yang mencolok. Di beberapa tanah seperti Bekasi dan Tambun, jumlah pemusnahan relatif tinggi dengan proporsi ternak sakit yang signifikan, mengindikasikan konsentrasi infeksi yang lebih intensif. Sebaliknya, di wilayah lain seperti Karang-Tjongkok atau Djagawana, kasus muncul dalam skala terbatas atau bahkan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Perbedaan ini menegaskan bahwa penyebaran wabah tidak homogen,

melainkan mengikuti dinamika lokal yang berkaitan dengan kepadatan agraris dan mobilitas ternak.

Khusus di Tambun, kemunculan kembali kasus setelah periode tanpa laporan infeksi menunjukkan bahwa stabilisasi wabah bersifat sementara. Persistensi kasus di delapan kampung dengan dominasi ternak yang benar-benar sakit memperkuat indikasi bahwa wilayah ini merupakan salah satu titik rawan dalam jaringan agraris Bekasi. Kondisi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa intervensi kolonial di wilayah ini cenderung lebih intensif dibandingkan daerah yang telah menunjukkan pemulihan.

Dalam kerangka relasi kuasa kolonial, variasi tingkat keparahan ini tidak hanya menghasilkan perbedaan kebijakan teknis, tetapi juga memperlihatkan bagaimana negara menentukan prioritas intervensi berdasarkan kalkulasi risiko terhadap stabilitas produksi agraris. Wilayah yang dianggap strategis dalam sistem distribusi memperoleh pengawasan dan tindakan eliminasi yang lebih keras, sementara masyarakat lokal berada dalam posisi penerima kebijakan tanpa kontrol atas alat produksi utama mereka.



Bagan 3. Peta Topografi Wilayah Tambun, Bekasi tahun 1903 (*Blad N.V.*). Detail peta ini memperlihatkan kluster pemukiman dan jaringan irigasi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi agraris sekaligus titik konsentrasi populasi ternak di Distrik Bekasi. (Sumber: (*Topographisch Bureau, 1903*), *Digital Collections, Leiden University Libraries*).

Sebaran kasus di Gedong Gedeh, Pabajoeran, dan Medang-Assem memperlihatkan pola yang relatif terbatas secara geografis, namun tetap menunjukkan tingkat keparahan yang signifikan di beberapa titik. Jumlah kampung terdampak memang lebih sedikit dibandingkan wilayah lain, tetapi proporsi ternak yang benar-benar sakit di beberapa Lokasi terutama di Medang-Assem menunjukkan bahwa intensitas infeksi masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penyempitan ruang sebaran tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat risiko.

Kondisi berbeda tampak di Distrik Tjabang-Boengin. Meskipun wabah hanya tercatat di tiga kampung, jumlah pemusnahan ternak justru paling tinggi dibandingkan distrik lain pada periode pelaporan yang sama. Kontras antara luas wilayah yang relatif kecil dan angka eliminasi yang besar menunjukkan adanya konsentrasi kasus yang tajam. Dengan kata lain, pola wabah di Bekasi tidak semata ditentukan oleh luas

administratif, tetapi oleh kepadatan aktivitas dan posisi wilayah tersebut dalam jaringan agraris yang lebih luas.

Secara umum, laporan pertengahan Juli 1880 memang menyatakan bahwa wabah mulai terkendali. Namun, stabilisasi tersebut bersifat parsial dan tidak merata. Beberapa wilayah menunjukkan pemulihan bertahap, sementara titik-titik tertentu seperti Tambun dan Tjabang-Boengin tetap memperlihatkan intensitas pemusnahan yang tinggi. Variasi ini mempertegas bahwa wabah di Bekasi bergerak dalam pola spasial yang tidak homogen, dengan konsentrasi risiko pada wilayah-wilayah yang memiliki keterhubungan ekonomi dan mobilitas ternak yang lebih aktif (*Bataviaasch Handelsblad, 1880*).

Persistensi kasus hingga akhir periode pelaporan menunjukkan bahwa penurunan angka wabah tidak serta-merta menandakan berakhirnya krisis. Keberadaan ternak yang masih dalam perawatan memperlihatkan bahwa sirkulasi penyakit belum sepenuhnya

terputus, terutama di wilayah agraris seperti Bekasi yang bergantung pada ternak sebagai alat produksi utama (Bataviaasch Handelsblad, 1885a; Java-Bode: Nieuws, 1885; Rotterdamsch Nieuwsblad, 1885), sebagai bagian dari pemberitaan ulang atau kompilasi arsip kolonial mengenai penyakit ternak.

Kebijakan pemusnahan dan pengawasan administratif lebih mencerminkan strategi pengendalian jangka pendek dibanding solusi struktural. Intervensi kolonial berfokus pada stabilitas produksi dan distribusi agraris yang menopang Batavia, tanpa menyentuh pola mobilitas dan struktur ekonomi pedesaan yang justru memproduksi kerentanan tersebut.

Munculnya penyakit lain seperti penyakit mulut dan kuku di tengah meredanya pes ternak, disertai laporan kekeringan dan kelangkaan pakan, memperlihatkan bahwa krisis yang terjadi bukanlah wabah tunggal yang terisolasi. Ia merupakan bagian dari tekanan ekologis dan agraris yang saling berkelindan. Dalam situasi seperti ini, kerentanan ternak tidak hanya disebabkan oleh infeksi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan dan sistem produksi yang tidak stabil. Hal tersebut mempertegas bahwa wabah di Bekasi bergerak dalam konteks krisis agraria yang lebih luas. Kasus masuknya 202 ekor sapi dari Bagelen pada Mei 1883 semakin menegaskan dimensi struktural penyebaran penyakit. Perjalanan lintas residensi melalui Preanger dan Karawang sebelum tiba di Pebajoran menunjukkan bahwa mobilitas ternak dalam jaringan distribusi kolonial menjadi faktor penting dalam transmisi wabah. Kondisi fisik ternak yang melemah akibat perjalanan panjang memperbesar risiko infeksi, sehingga karantina yang diterapkan

bersifat reaktif, bukan preventif (Bataviaasch Handelsblad, 1885b).

Penerapan cordon sanitaire, penyediaan dokter hewan, serta peningkatan pengawasan oleh para residen memperlihatkan keseriusan administratif pemerintah kolonial dalam membatasi perluasan wabah. Namun, langkah-langkah tersebut terutama diarahkan pada perlindungan stabilitas ekonomi regional dan pencegahan gangguan distribusi ternak antarwilayah. Dengan demikian, intervensi negara tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan kesehatan hewan, tetapi sebagai mekanisme pengamanan sistem ekonomi kolonial yang terintegrasi.

Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa Bekasi berada dalam posisi rentan sebagai wilayah agraris penyangga Batavia. Integrasinya dalam jaringan distribusi ternak lintas residensi menjadikan wilayah ini terbuka terhadap arus masuk penyakit, sementara kebijakan pengendalian lebih berorientasi pada stabilitas administratif dibandingkan pemulihan ekonomi petani secara menyeluruh (Java-Bode: Nieuws, 1883b; Landbouw-courant, 1883).

Pengawasan ketat oleh para residen di wilayah perbatasan memperlihatkan keseriusan pemerintah kolonial dalam membatasi mobilitas ternak sebagai sumber potensial penyebaran wabah. Instruksi untuk mengontrol lalu lintas hewan di sekitar Bekasi dan Batavia menunjukkan bahwa kekhawatiran utama bukan hanya pada tingkat kematian ternak, melainkan pada risiko meluasnya gangguan ekonomi regional di Jawa bagian barat (Java-Bode: Nieuws, 1883b).

Namun demikian, munculnya perdebatan mengenai sumber penularan apakah berasal dari arus ternak baru atau

justro dari lokasi karantina mengindikasikan adanya ketidakpastian internal dalam sistem pengendalian tersebut. Karantina yang secara normatif dirancang sebagai instrumen pencegahan justro dipersepsikan berpotensi menjadi titik akumulasi risiko. Situasi ini menyingkap keterbatasan administratif dalam mengelola mobilitas ternak yang semakin intensif seiring integrasi ekonomi kolonial.

Wilayah Meester-Cornelis serta perbatasan Karawang–Bekasi dalam konteks ini menjadi ruang epidemiologis strategis sekaligus rentan. Fungsinya sebagai jalur transit, lokasi karantina, dan daerah penyangga Batavia menjadikan kawasan ini titik temu antara kepentingan kesehatan hewan dan stabilitas distribusi ekonomi. Pemberitaan surat kabar tidak sekadar mencatat peristiwa wabah, tetapi juga mencerminkan kecemasan kolonial terhadap kemungkinan kegagalan kontrol atas jaringan agraria yang semakin kompleks (Landbouw-courant, 1883).

Beberapa dekade setelah wabah pes ternak 1880-an, kemunculan kembali penyakit menular seperti antraks (miltvuur) pada 1899 dan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 1901 menunjukkan bahwa persoalan kesehatan hewan di Jawa bagian barat bukanlah peristiwa insidental, melainkan fenomena berulang dalam struktur agraris kolonial. Laporan resmi mengenai kasus di Karawang, Bekasi, Tjikarang, dan Tambun memperlihatkan bahwa pusat-pusat perkebunan dan wilayah dengan kepadatan ternak tinggi tetap menjadi titik rawan penyebaran penyakit (De Locomotief: Semarangsch Handels-en Advertentie-Blad, 1899).

Pola ini menegaskan kontinuitas kerentanan epidemiologis di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Penyakit tidak lagi

terbatas pada satu jenis infeksi tertentu, tetapi muncul dalam bentuk yang berbeda dari pes ternak hingga antraks dan PMK yang semuanya memiliki karakter sangat menular dan terkait erat dengan mobilitas ternak. Artinya, persoalan utama bukan semata jenis penyakit, melainkan struktur pergerakan hewan dan integrasi ekonomi antarwilayah yang membuka ruang transmisi berulang (De Locomotief: Semarangsch Handels-en Advertentie-Blad, 1901).

Dalam konteks ini, keterbatasan sistem pengendalian kolonial semakin tampak. Upaya administratif seperti pelaporan resmi, pengawasan residen, dan karantina memang diterapkan, tetapi belum disertai pendekatan biosekuriti yang sistematis sebagaimana dikenal dalam praktik veteriner modern. Kajian ilmiah kontemporer mengenai PMK menegaskan bahwa penyakit ini sangat mudah menyebar melalui mobilitas ternak sebelum gejala klinis terlihat, sehingga memerlukan vaksinasi, pembatasan lalu lintas, dan pengawasan ketat sebagai langkah preventif. Ketidakhadiran strategi semacam itu pada masa kolonial membantu menjelaskan mengapa wabah penyakit ternak di Jawa bagian barat cenderung berulang (Grehenson, 2023).

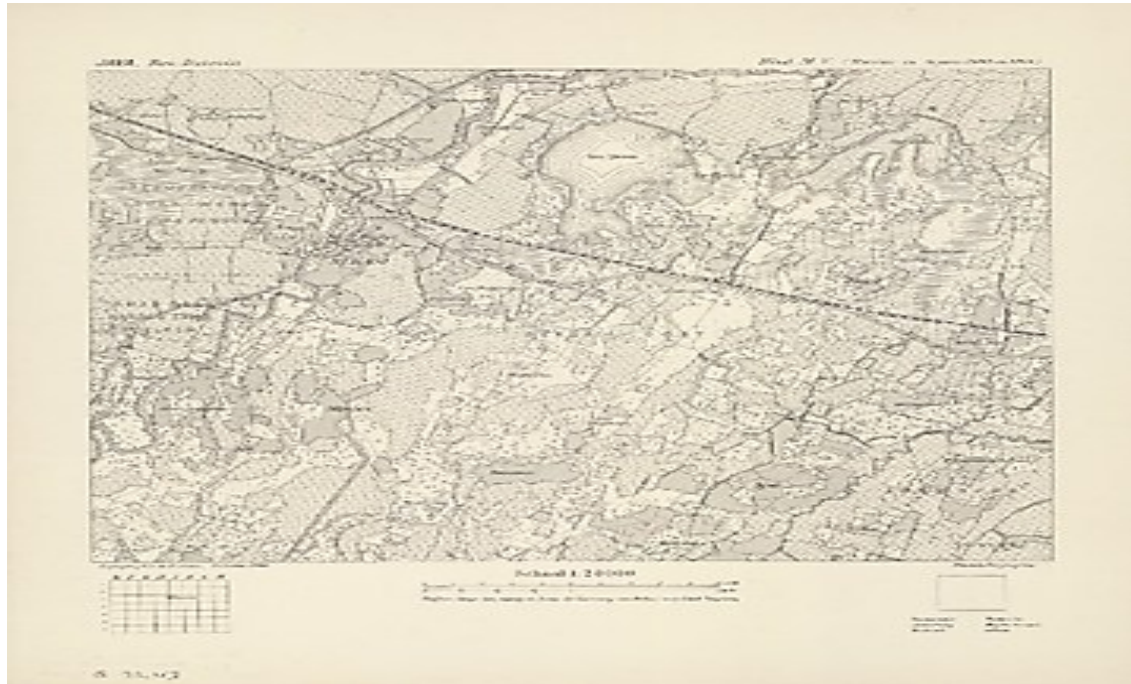
Kemunculan kembali wabah pada 1908, yang oleh penduduk disebut sebagai penyakit “ngorok” di wilayah Cibitung dan Tjikarang, menunjukkan berlanjutnya kerentanan epidemiologis di kawasan agraris Bekasi. Penyakit yang kemungkinan merujuk pada Septicaemia Epizootica (SE) ini menyerang sentra-sentra ternak seperti Tamboen, Gedonggede, dan Koemedjing wilayah yang sejak akhir abad ke-19 menjadi bagian penting dalam jaringan produksi

agraria sekitar Batavia (Het Vaderland, 1908).

Karakter penyakit yang bersifat akut dan mematikan, dengan kematian yang dapat terjadi dalam waktu singkat, menegaskan tingginya risiko pada sistem peternakan dengan kepadatan dan mobilitas hewan yang tinggi. Gejala pembengkakan dan gangguan pernapasan yang digambarkan dalam laporan memperlihatkan pola infeksi cepat yang sulit dikendalikan tanpa sistem deteksi dan pencegahan yang memadai (Nia Setiawati, 2025). Ketiadaan data pasti mengenai jumlah korban ternak juga menunjukkan keterbatasan dokumentasi

epidemi pada tingkat lokal (Het Vaderland, 1908).

Respons administratif berupa pembatasan lalu lintas ternak oleh kontrolir Bekasi kembali memperlihatkan pola yang konsisten dengan dekade-dekade sebelumnya pengendalian dilakukan melalui penutupan wilayah dan regulasi mobilitas (Het Vaderland, 1908). Pendekatan ini menegaskan bahwa instrumen utama pemerintah kolonial dalam menghadapi wabah tetap bertumpu pada kontrol administratif, bukan pada transformasi struktural sistem peternakan.



Bagan 4. Peta Topografi Wiayah Bekasi tahun 1902 (Blad M.V.). Visualisasi ini menggambarkan pembagian lahan dan pemukiman di Bekasi-West dan Bekasi-Oost yang menjadi lokus pengaawasan veteriner selama periode epidemi. (Sumber: (Topographisch Bureau, 1901), Digital Collections, Leiden University Libraries).

Menutup rangkaian wabah penyakit ternak di Bekasi hingga awal abad ke-20, laporan tahun 1908 kembali mencatat merebaknya Septichaemia Epizootica (SE) di tanah partikelir Tamboen, onderdistrik Tjibitoeng, Distrik Bekasi (De Preange-Bode, 1908). Penyakit epizootik yang menyebar cepat di antara ternak ini mempertegas kerentanan

kawasan agraris dan perkebunan Bekasi yang sangat bergantung pada tenaga hewan sebagai penopang produksi.

Dalam perspektif kedokteran hewan modern, SE yang juga dikenal sebagai hemorrhagic septicaemia merupakan penyakit bakteri akut dengan tingkat fatalitas tinggi pada sapi dan kerbau di wilayah tropis (Nia Setiawati,

2025). Penyakit ini telah tercatat di Jawa sejak dekade 1880-an dan menyebar mengikuti jalur mobilitas ternak di kawasan barat pulau tersebut. (Nia Setiawati, 2025). Karakter penyebarannya yang cepat serta daya tahan bakteri di lingkungan menjelaskan mengapa pengendalian wabah pada masa kolonial menghadapi keterbatasan struktural, terutama karena sistem vaksinasi dan biosekuriti belum berkembang secara sistematis pada periode tersebut.

Kemunculan kembali SE pada 1908, setelah rangkaian wabah pes ternak, antraks, dan penyakit mulut dan kuku, menunjukkan bahwa Bekasi bukan sekadar lokasi kejadian insidental, melainkan bagian dari lintasan epidemiologis yang berulang. Sejak 1880 hingga awal abad ke-20, wilayah ini secara konsisten muncul dalam laporan wabah di Jawa bagian barat, memperlihatkan keterkaitan erat antara mobilitas ternak, intensifikasi agraria kolonial, dan kerentanan kesehatan hewan. Dengan demikian, dinamika wabah penyakit ternak di Bekasi pada periode 1880–1908 tidak dapat dipahami sebagai rangkaian peristiwa terpisah. Ia merepresentasikan pola epidemi yang berulang dalam struktur agraris kolonial yang terintegrasi secara ekonomi namun rentan secara ekologis.

Dinamika Sosial-Ekonomi dalam Relasi Kekuasaan Kolonial di Bekasi

Pada konteks peternakan di Bekasi akhir abad ke-19, standar Kesehatan ternak tidak hanya diukur dari kondisi fisiologis hewan secara individual, tetapi juga melalui sistem pengawasan kolonial. Dalam praktik dokter hewan, pengamatan terhadap ternak yang menunjukkan indikasi sakit merupakan tahapan awal

untuk mengidentifikasi perubahan kondisi fisik melalui tanda-tanda klinis yang tampak, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai jenis penyakit serta faktor penyebabnya (Astuti, 2010). Oleh sebab itu, kesehatan ternak tidak hanya berkaitan dengan kondisi biologis individu hewan, tetapi juga dengan sistem pengawasan dan deteksi dini yang memungkinkan intervensi dilakukan sebelum penyebaran penyakit meluas. (Astuti, 2010).

Dalam konteks yang lebih luas, dikenal pula kategori penyakit hewan strategis, yakni penyakit yang menimbulkan kerugian ekonomi besar karena sifatnya yang sangat menular serta kemampuan penyebarannya yang cepat. Penyakit semacam ini umumnya menyebabkan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat jika termasuk dalam kelompok zoonosis (Pratama et al., 2020)

Klasifikasi penyakit hewan menular sebagai “strategis” didasarkan pada tiga pertimbangan utama. Pertama, dari aspek ekonomi, penyakit tersebut secara signifikan dapat menghambat produksi dan reproduksi ternak serta mengganggu aktivitas perdagangan. Kedua, dari sisi politik dan sosial, penyakit ini berpotensi menimbulkan kesehatan masyarakat, khususnya jika berkaitan dengan ancaman kesehatan manusia. Ketiga, dari sudut pandang strategi, tingkat kematian yang tinggi dan laju penularan yang cepat menuntut pengendalian ketat terhadap lalu lintas ternak maupun produk hasil ternak (Pratama et al., 2020).

Dalam kerangka historis, kategori penyakit hewan strategis ini membantu menjelaskan mengapa wabah ternak pada masa kolonial tidak hanya dianggap

sebagai masalah kesehatan hewan, tetapi juga sebagai masalah ekonomi dan stabilitas sosial. Ketika suatu penyakit memenuhi kriteria strategis menular cepat, mematikan, dan berdampak pada produksi, maka intervensi negara menjadi lebih intensif dan sering kali disertai dengan mobilitas yang ketat.

Penelitian wabah hewan dalam konteks sejarah sosial tidak berhenti pada data epidemiologis, tetapi perlu menjelaskan bagaimana negara membentuk kebijakan berdasarkan persepsi risiko dan struktur sosial-ekonomi yang melingkupinya. Perspektif historis mengenai penyakit ternak dan kebijakan masyarakat tekanan bahwa wabah merupakan fenomena yang dibentuk oleh politik kesehatan, mobilitas manusia-hewan, serta kapasitas administratif dalam menanggapi krisis (Woods, 2011). Dengan demikian, wabah tidak hanya merupakan persoalan biologi, melainkan juga arena di mana negara mendefinisikan risiko dan menentukan prioritas intervensi.

Pendekatan historis terhadap penyakit ternak seperti rinderpest menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga mendorong reformasi kebijakan kesehatan hewan serta membentuk kembali hubungan kekuasaan antara negara dan masyarakat lokal, baik dalam konteks kolonial maupun pascakolonial (Waller, 2004). Studi mengenai kebijakan kolonial di Kenya pada tahun 1900–1940, misalnya, menunjukkan bahwa intervensi pengendalian penyakit sering kali mencerminkan status kolonial suatu wilayah, kepentingan ekonomi metropolitan, serta struktur sosial masyarakat setempat (Waller, 2004). Artinya, kebijakan kesehatan hewan tidak pernah netral; ia selalu terhubung dengan

kepentingan politik dan ekonomi yang lebih luas.

Dalam kerangka tersebut, variasi distribusi wabah dan respons administratif kolonial di Bekasi dapat dibaca sebagai bagian dari pola penyakit hewan lintas batas yang membawa konsekuensi sosial dan ekonomi yang signifikan. Literatur mengenai epidemi hewan transregional menekankan bahwa penyakit dengan kemampuan penyebaran luas tidak hanya mempengaruhi populasi ternak, tetapi juga memicu restrukturisasi mobilitas pasar, penguatan regulasi negara, serta negosiasi kekuasaan antara otoritas kolonial dan masyarakat lokal (Clemmons, 2021). Dengan demikian, dinamika wabah ternak di Bekasi bukanlah kasus yang terlindungi, melainkan bagian dari fenomena global tentang bagaimana negara kolonial menggunakan kebijakan kesehatan hewan untuk mengatur ruang ekonomi dan sosial.

Berdasarkan laporan-laporan kolonial mengenai wabah penyakit ternak di Bekasi pada periode 1880–1908, terlihat bahwa wabah tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang nyata bagi petani kecil. Dalam periode 3–19 Juni 1880, Distrik Bekasi melaporkan pemusnahan 175 ekor kerbau, terdiri dari 90 ekor sakit dan 85 ekor diduga tertular (Bataviaasch Handelsblad, 1880; De Standaard, 1880). Dengan asumsi harga rata-rata satu ekor kerbau sekitar 5–7 gulden, potensi kerugian langsung mencapai 875–1.225 gulden. Jumlah ini bukan sekadar angka nominal, melainkan representasi hilangnya modal produksi utama dalam sistem pertanian sawah, di mana kerbau berfungsi sebagai tenaga bajak, alat

transportasi, sekaligus penopang siklus tanam.

Di tanah Tamboen, dampak ekonomi serupa juga terlihat. Laporan pertengahan Juli 1880 mencatat 39 ekor kerbau dirusak, 31 di antaranya dalam kondisi sakit (Bataviaasch Handelsblad, 1880). Dengan harga rata-rata yang sama, potensi kerugian mencapai sekitar 195–273 gulden hanya dalam satu kawasan partikel. Wilayah lain seperti Medang-Assem dan Pabajoeran masing-masing kehilangan 23 dan 9 ekor kerbau, dengan perkiraan kerugian tambahan sebesar 160–224 gulden. Akumulasi angka-angka ini menampilkan bahwa kebijakan pemusnahan ternak sebagai instrumen pengendalian wabah secara langsung mengalihkan beban krisis kepada rumah tangga petani.

Dalam perspektif struktural, ketergantungan tinggi terhadap ternak sebagai modal produksi menyebabkan satu gangguan biologi segera berubah menjadi krisis ekonomi. Negara kolonial memang melakukan intervensi melalui pemusnahan dan regulasi mobilitas ternak, namun kerugian finansial utama tetap ditanggung oleh petani lokal. Situasi ini diperparah oleh keterlambatan pembayaran ganti rugi. Laporan surat kabar menunjukkan bahwa pembaruan sering kali tertunda berbulan-bulan (De Locomotief, 1883; Java-Bode: Nieuws, 1883a), sehingga petani kehilangan kemampuan untuk seger mengganti ternak yang musnah dan melanjutkan produksi pertanian.

Oleh karena itu, wabah ternak di Bekasi tidak hanya menjadi krisis kesehatan hewan, tetapi berkembang menjadi krisis ekonomi pedesaan. Ketika negara kolonial mengutamakan stabilitas distribusi dan pengendalian mobilitas, perlindungan terhadap kemiskinan

ekonomi rumah tangga agraris berada pada posisi sekunder. Titik inilah wabah berfungsi bukan hanya sebagai peristiwa epidemiologis, melainkan momen yang menampilkan ketimpangan hubungan kekuasaan dalam struktur agraria kolonial.

Dampak sosial-ekonomi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan kolonial secara normatif dan implementasinya di tingkat lokal. Secara formal, pemerintah kolonial mengakui kewajiban memberikan ganti rugi atas ternak yang dirusak sebagai bagian dari kebijakan pengendalian wabah. Namun dalam praktik administratif, proses penyelesaian sering kali berjalan lambat dan tidak proporsional dengan urgensi kebutuhan petani. Keterlambatan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga agraris bukanlah prioritas utama dalam hierarki kebijakan kolonial.

Ketimpangan tersebut semakin terlihat jika dibandingkan dengan kemudahan pembiayaan aparatur dan administrasi operasional. Struktur birokrasi kolonial tetap berfungsi dan terbiayai, sementara petani yang kehilangan ternak modal produksi utama mereka harus menanggung konsekuensi ekonomi dalam jangka waktu yang tidak pasti. Dalam konteks ini, risiko epidemi tidak sepenuhnya diserap oleh negara, melainkan didistribusikan secara efektif ke tingkat masyarakat lokal.

Dengan menggunakan data pemusnahan ternak serta perkiraan kerugian finansial, terlihat bahwa wabah veepest, antraks, penyakit mulut dan kuku (PMK), hingga Septicemia Epizootica di Bekasi berdampak signifikan terhadap struktur ekonomi rumah tangga petani. Ketergantungan tinggi pada ternak sebagai tenaga kerja

pertanian menjadikan setiap kematian hewan sebagai kehilangan aset produktif yang langsung mengganggu siklus tanam, kapasitas produksi, dan ketahanan ekonomi pedesaan. Dalam perspektif struktural, kondisi ini menunjukkan bahwa wabah ternak berfungsi sebagai titik tekan yang menampilkan rapuhnya ekonomi agraris kolonial di tingkat akar rumput.

Artikel ini menunjukkan bahwa wabah penyakit ternak tidak hanya merupakan krisis kesehatan hewan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol kolonial terhadap ekonomi agraris lokal melalui regulasi mobilitas, pemusnahan ternak, dan pengaturan kompensasi.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa serangkaian wabah penyakit ternak di Bekasi dan sekitarnya (1880-1908) bukan sekedar catatan kematian hewan, melainkan potret kegagalan sistem keamanan hayati (*biosecurity*) awal di Hindia Belanda. Fenomena di Tamboen dan Tjabangboengin membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan perluasan perkebunan swasta yang bertujuan untuk integrasi ekonomi, justru menjadi alternatif bagi transmisi patogen trans-wilayah

Secara historiografis, penelitian ini memperkaya diskursus sejarah lingkungan kolonial di Indonesia dengan mendekonstruksi narasi kemajuan kolonial. Temuan ini menunjukkan ekspansi ekonomi agraris seringkali dibayar mahal dengan degradasi kesehatan lingkungan dan hilangnya aset modal dasar masyarakat lokal. Perbedaan pencatatan dalam sumber-

sumber veteriner kolonial tidak sekadar menunjukkan ketidakteraturan administratif, tetapi merupakan bukti bagaimana pengetahuan diproduksi secara selektif untuk melayani kepentingan ekspor dan stabilitas negara.

Dalam perspektif kebijakan kesehatan pengalaman kolonial ini memberikan pelajaran fundamental, yakni pengendalian wabah yang mengabaikan kompensasi dan keadilan sosial akan selalu memicu kerentanan sistemik. Kebijakan represif seperti pemusnahan ternak massal tanpa skema perlindungan sosial terbukti hanya memindahkan beban krisis kepada peternak kecil. Oleh karena itu, refleksi dari masa kolonial menegaskan bahwa keberhasilan penanganan wabah di masa depan memerlukan sinkronisasi antara akurat data veteriner, koordinasi lintas wilayah dan yang paling utama, keberpihakan pada aspek ekonomi peternak pedesaan sebagai bentuk keadilan sosial dalam keamanan kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, L. G. S. (2010). *Petunjuk Praktis Manajemen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada ternak Sapi*. Kementerian Pertanian: Balai Pengkajian Teknologi Peternakan Nusa Tenggara Barat.
- Bataviaasch Handelsblad. (1880, August 31). Vervolg op het voorkomende in de Javasche Courant van 20 dezer no. 58. *W. Bruining*.
- Bataviaasch Handelsblad. (1885a, July 4). Brichten uit de Javasche Courant. *W. Bruining*.

- Al Haramain, M.M. (2026). Wabah Penyakit Ternak di Bekasi Masa Hindia Belanda (1880-1908). *Jurnal Artefak*, 13 (1), 39-58
- Bataviaasch Handelsblad. (1885b, September 1). Brichten uit de Javasche Ct. *W. Bruining*.
- Clemmons, E. A. (2021). Transboundary Animal Diseases, an Overview of 17 Diseases with Potential for Global Spread and Serious Consequences. *Animals*, 11(7). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/ani11072039>
- De Locomotief. (1883, November 12). Verspreide Indische berichten. *De Groot, Kolff & Co.*
- De Locomotief: Semarangsch Handels-en Advertentie-Blad. (1899, May 23). Officieele Berichten. *De Groot, Kolff & Co.*
- De Locomotief: Semarangsch Handels-en Advertentie-Blad. (1901, July 23). Veeziekte. *De Groot, Kolff & Co.*
- De Preange-Bode. (1908, September 22). Veeziekte. *J.R de Vries & Co.*
- De Standaard. (1880, August 27). Koloniën. *H. de Hoog Hen Co.*
- Delpher.nl. (2013). *Historische Nederlandse Kranten, Boeken en Tijdschriften*. Nationale Bibliotheek: The National Library of Netherlands. www.delpher.nl
- Farmer, P. (2004). *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. University of California Press.
- Grehenson, G. (2023, December 21). Guru Besar UGM Paparkan Penyebab Wabah PMK Kembali Muncul Setelah 32 Tahun. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/guru-besar-ugm-paparkan-penyebab-wabah-pmk-kembali-muncul-setelah-32-tahun/>
- Het Vaderland. (1882, February 23). Veeziekte. *M. Najhoff & C.A. van Reyn.*
- Het Vaderland. (1908, October 23). Veeziekte. *M. Nijhoff & C.A. van Reyn.*
- Java-Bode: Nieuws. (1883a, November 9). Nederlandsch-Indie. *Bruining*.
- Java-Bode: Nieuws. (1885, July 4). Nederlandsch-Indië. *Bruining*.
- Java-Bode: Nieuws, handels-en advententieblad voor N.-I. (1880, July 14). Onbevoegd Verklaring op Grong van Art. 110 R. O. Uitstraak Omteent de Kosten. *Bruining*.
- Java-Bode: Nieuws, handels-en advententieblad voor N.-I. (1883b, May 30). Nederlandsch-Indie. *Bruining*.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2018). *Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (PHM) Seri Penyakit Anthrax*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Landbouw-courant. (1880, August 29). Gemengde Berigten; Aanteekeningen enz. *Plaats van Uitgave*.
- Landbouw-courant. (1883, July 12). Gemengde Berigten; Aanteekeningen enz. *G.j. Thiem & Plaats van Uitgave*.
- Laura Stoler, A. (2010). *Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*. Princeton University Press.
- Madjid, M. D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Kencana.
- Nia Setiawati, E. (2025, December 9). Penyakit Septicaemia Epizootika Pada Ruminansia Dan Upaya Pencegahannya. *Kementerian Pertanian RI, BPPSDM Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara*. <https://bbpkhcinagara.bppsdp.pertanian.go.id/artikel/penyakit-septicaemia-epizootika-pada->

- ruminansia--dan-upaya--
pencegahannya
- Pratama, M. G. G., Pramudya, D., & Cahya Endrawati, Y. (2020). Sosialisasi Penyakit Hewan Ternak dan Penanggulangannya di Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(4).
- Rotterdamsch Nieuwsblad. (1885, August 14). Kolonien. *A.W. Sijthoff*.
- Sutendy, U. A. (2015). Dampak Penemuan-Penemuan Ilmu Pengetahuan Terhadap Konsep Ketuhanan Pada Zaman Pencerahan. *Jurnal Artefak* , 3(2), 221–230. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i2.1102>
- Topographisch Bureau. (1899). *Kaart van het gedeelte der Residentie Batavia*. Batavia: Topographisch Bureau. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:57302>
- Topographisch Bureau. (1900). *Spoor-en tramwegkaart van Java en Madoera*. Batavia: Topographisch Bureau. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:56262>
- Topographisch Bureau. (1901). *Bekasi, herzien in de jaren 1900 en 1901, D G*. Batavia: Topographisch Bureau. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:814466>
- Topographisch Bureau. (1903). *Tamboen, herzien in het jaar 1902, D G 22,57*. Batavia: Topographisch Bureau. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:814967>
- Triyanto Ramadhan, D., & Santi Muji Utami, C. (2025). The Spread of Foot and Mouth Disease on Livestock in the Ex Semarang Residency 1981-1986. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 9(3).
- Van Roosbroeck, F. (2016). Discussie, Statistiek en Standaard-formulieren: de Veepest in de Oostenrijkse Nederlanden en haar Bronnen (1769–1785). *Tijd-Schrift*, 6(2). https://histories.be/wp-content/uploads/2020/12/TS2016_2_3_Veepest.pdf
- Van Sandick, R. A. (1893). *Leed en Liefuit Bantam* (2nd ed.). WJ Thieme.
- Waller, R. (2004). “Clean” and “Dirty”: Cattle Disease and Control Policy in Colonial Kenya, 1900-40. *The Journal of African History*, 45(1), 45–80. <http://www.jstor.org/stable/4100332>
- Wijayanti, Y., & Kartika, R. (2014). Tradisi Nyangkreb di Dusun Sukaraja Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis (Suatu Tinjauan Sejarah Kebudayaan Dari Tahun 1972-2007). *Jurnal Artefak*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/ja.v2i1.1052>
- Woods, A. (2011). A historical synopsis of farm animal disease and public policy in twentieth century Britain. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series B: Biological Science*, 366(1573), 1943–1954. <https://doi.org/https://doi.org/10.1098/rstb.2010.0388>